

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

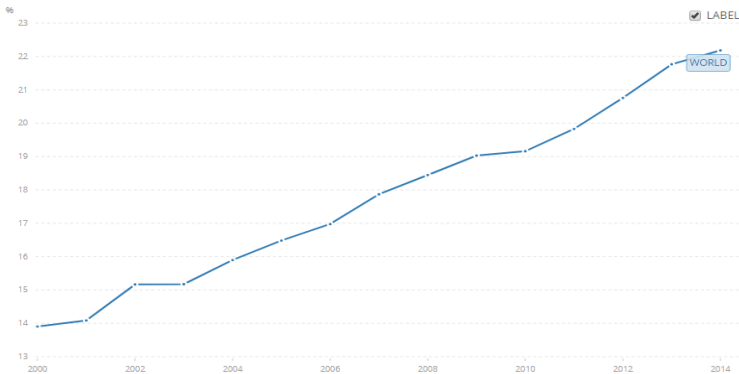
Pada saat ini, berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan masih banyak terjadi di berbagai belahan dunia, meskipun saat ini sudah memasuki era globalisasi. Isu feminisme sendiri yang memperjuangkan hak perempuan dalam berbagai sektor telah berkembang sejak berabad-abad dahulu tepatnya sejak akhir abad ke-18. Akan tetapi, meski sudah berkembang sejak lama dan berbagai gerakan muncul untuk menjunjung tinggi kesetaraan terhadap perempuan dan laki-laki, nyatanya perjuangan tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Progres untuk mencapai kesetaraan gender secara global nyatanya masih sangat lamban<sup>1</sup>.

Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya bentuk diskriminasi terhadap perempuan, misalnya dalam bidang politik. Di sebagian negara maju, representasi perempuan dalam politik memang sudah tinggi, bahkan sudah mendapatkan hampir 50% kursi di pemerintahan, akan tetapi kenyataannya masih banyak sekali representasi perempuan yang sangat rendah di negara-negara lain, apalagi di negara-negara berkembang.

---

<sup>1</sup> Kimberley Reader, "Feminism today: the fight has changed, the stereotypes remain, and the cause will never die", diakses dari <https://www.google.co.id/amp/s/www.independent.co.uk/voices/comment/feminism-today-the-fight-has-changed-the-stereotypes-remain-and-the-cause-will-never-die-8364343.html%3famp> pada 25 Januari 2018 pukul 19.08

Grafik 1.1 Jumlah Perempuan yang Menduduki Kursi di Parlemen Nasional (%)



Sumber: [worldbank.org](http://worldbank.org)

Dari data diatas terlihat bahwa secara global, presentasi perempuan dalam politik bahkan masih jauh dari setara dengan jumlah laki-laki dalam parlemen. Meskipun dari tahun ke tahun sejak tahun 2000 mengalami peningkatan yang signifikan, akan tetapi persentasenya masih sekitaran 20%.

Selain itu, dalam bidang ekonomi misalnya, diskriminasi terhadap perempuan berdasarkan seks masih sering terjadi, bahkan di negara besar dan maju sekalipun. Di Swedia sendiri, terkadang masih terjadi kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan yang menimbulkan berbagai kontra dimasyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pada era globalisasi saat inipun, isu mengenai kesenjangan gender masih banyak terjadi di berbagai belahan bumi. Berbagai negara mencoba untuk terus memerangi isu kesenjangan gender ini, begitupun dengan Swedia yang terkenal sebagai negara feminis pertama di dunia.

Swedia adalah salah satu negara Skandinavia dengan jumlah populasi sekitar 9,5 juta jiwa. Ibu kota Swedia adalah Stockholm. Swedia adalah salah satu negara maju di dunia dengan angka pengangguran yang sangat rendah, berdasarkan

data dari World Bank tahun 2014 yaitu sebesar 5,52%, dan perekonomian yang sangat kuat. Selain itu, angka harapan hidup dinegara ini juga sangat tinggi yaitu mencapai 80 tahun untuk laki-laki dan 84 tahun untuk perempuan<sup>2</sup>.

Swedia sudah sejak lama menjunjung tinggi nilai kesetaraan gender, bahkan sejak beberapa dekade yang lalu, sebelum banyak negara mulai menyadari pentingnya kesetaraan gender baik bagi laki-laki maupun perempuan. Pemerintah Swedia berusaha untuk terus meningkatkan angka kesetaraan gender di negaranya dengan memastikan bahwa baik laki-laki dan perempuan diperlakukan sama dalam segala sektor kehidupan. Komitmen pemerintah Swedia dalam hal kesetaraan gender telah dibuktikan dengan dibuatnya pasal mengenai kesetaraan gender, yaitu pasal 1 ayat 2 dan pasal 2 ayat 13 dalam konstitusi Swedia, sebagai berikut :

“The public institutions shall promote the opportunity for all to attain participation and equality in society and for the rights of the child to be safeguarded. The public institutions shall combat discrimination of persons on grounds of gender, color, national or ethnic origin, linguistic or religious affiliation, functional disability, sexual orientation, age or other circumstance affecting the individual.” (Pasal 1 ayat 2)

“No act of law or other provision may imply the unfavorable treatment of anyone on grounds of gender, unless the provision forms part of efforts to promote equality between men and women or relates to compulsory military service or other equivalent official duties.” (Pasal 2 ayat 13)

Dari pasal-pasal diatas sangat jelas, bahwa dalam konstitusi Swedia sendiri tidak ada pernyataan yang menyatakan adanya jumlah tertentu bagi partisipasi laki-laki maupun perempuan, baik itu di bidang pemilihan umum

---

<sup>2</sup>BBC, “Sweden Country Profile”, diakses dari [www.bbc.com/news/world-europe-17955808](http://www.bbc.com/news/world-europe-17955808), pada tanggal 25 Januari 2018 pukul 20.22

maupun dalam sektor akademik. Sehingga, seiring dengan meningkatnya jumlah organisasi perempuan dan isu partisipasi perempuan di ranah publik, persentase keterlibatan perempuan di ranah politikpun lambat laun semakin meningkat di Swedia. Meskipun pada tahun 1971, jumlah perempuan di parlemen masih 14%, namun sejak pemilihan umum 1994, persentase perwakilan perempuan di parlemen mencapai angka 40%, dan sejak saat itu, persentase perempuan tidak pernah dibawah 40% dalam setiap pemilihan umum. Pada tahun 1994 tepatnya ada 41% perempuan di parlemen, tahun 1998 ada 43%, tahun 2002 ada 45%, tahun 2006 ada 47,3%, 2010 ada 45% dan tahun 2014 44%. Angka tertinggi yaitu pada pemilu 2006, dimana mencapai 47,3% perempuan yang terpilih untuk duduk di kursi parlemen<sup>3</sup>.

Pada masa pemerintahan yang baru dibawah partai sosial-demokrat sejak 2014, Swedia yang menyatakan dirinya sebagai negara feminis pertama di dunia, Stefan Löfvén sebagai perdana menteri yang baru, pada 3 Oktober 2014 mendeklarasikan bahwa pemerintah akan membuat sebuah penilaian mengenai kesetaraan gender dalam ranah industri dan menyetujui adanya kuota gender dalam bidang tersebut untuk memastikan bahwa perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam dunia kerja<sup>4</sup>. Kuota yang dicanangkan adalah antara 40-60% partisipasi perempuan dalam suatu perusahaan.

Memasuki masa kepemimpinana baru pada tahun 2014, dimana Margot Wallstorm terpilih menjadi menteri luar negeri Swedia. Sejak terpilihnya Wallstorm sebagai menteri luar negeri yang baru, pada oktober 2014, ia meluncurkan Politik Luar Negeri Feminis untuk yang pertama kalinya di dunia<sup>5</sup>. Sejak tahun ini, Swedia mengambil langkah radikal

---

<sup>3</sup>Freidenvall Lenita., “*Fact Sheet on Sweden*”. (Paper presented at the Workshop on Legal Struggles and Political Mobilization around Gender Quotas in Europe, Florence, 2014), 7.

<sup>4</sup>Freidenvall, Op.Cit., 5.

<sup>5</sup>Foreign Affairs Ministry of Sweden, “Sweden feminist foreign policy examples from three years of implementation”, diakses dari [www.government.se/information-](http://www.government.se/information-)

untuk mencapai kesetaraan gender. Pada masa pemerintahan sebelumnya, meskipun sudah sejak lama Swedia memperhatikan isu kesetaraan gender, namun baru pada masa pemerintahan yang baru ini, Swedia benar-benar mengambil langkah tegas untuk mencapai kesetaraan gender didunia. Karena Swedia merasa, meskipun sudah banyak terjadi peningkatan hak perempuan, namun pada faktanya masih banyak perempuan yang mengalami diskriminasi di berbagai bidang. Maka, pemerintah Swedia melalui kementerian luar negerinya menegaskan bahwa perspektif gender harus dimasukkan dalam berbagai area politik luar negeri Swedia. Ambisi ini dinyatakan sebagai bentuk tindakan yang sangat berani dan memiliki andil yang cukup besar untuk pencapaian kesetaraan gender dan pemenuhan hak asasi manusia secara penuh untuk semua perempuan dan laki-laki. Selain itu, Swedia juga berharap, melalui politik luar negeri feminis ini, perdamaian dunia secara berangsur-angsur dapat tercapai dengan semakin memperhatikannya posisi perempuan dalam berbagai hal, khususnya dalam penyelesaian konflik dan pengambilan kebijakan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan diambil dalam penulisan karya ilmiah ini adalah : **Bagaimana implementasi politik luar negeri feminis Swedia tahun 2014-2017?**

## **C. Kerangka Pemikiran**

Untuk dapat menganalisa penelitian ini lebih mendalam, maka dibutuhkan kerangka pemikiran untuk dapat membangun sebuah pernyataan yang mengandung variable-variabel yang memiliki keterkaitan untuk membangun sebuah fakta dari suatu penelitian, agar kelak fakta tersebut dapat

menjadi suatu karya ilmiah yang valid. Sehubungan dengan rumusan masalah yang ada, penulis mencoba menjawabnya melalui Konsep Feminisme dan Konsep *Soft Power*, berikut penjelasannya:

### **C.1. Konsep Feminisme**

“Feminisme adalah serangkaian pemikiran yang mengakui secara eksplisit bahwa perempuan tersubordinasi oleh laki-laki dan berusaha mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu feminisme adalah gerakan budaya dan gerakan politik yang ingin mengubah cara berpikir perempuan serta mengubah hubungan antara perempuan dan laki-laki di dalam keluarga dan masyarakat.”<sup>6</sup>

Feminisme adalah suatu pemikiran yang meyakini bahwa harus adanya kesetaraan gender antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Selain itu, feminisme juga merupakan suatu studi dan gerakan yang bertujuan untuk mengubah paradigma perempuan sebagai objek menjadi perempuan sebagai subjek. Beberapa dekade sebelumnya dalam dunia hubungan internasional, kaum perempuan masih belum dilibatkan dalam berbagai arena internasional. Bahkan sebelum 1980-an, peran gender dalam praktek hubungan internasional masih belum dapat diterima, sehingga maskulinitas dalam hubungan internasional masih sangat ketara dan mendominasi.

Beberapa dekadepun sudah berlalu, berbagai gerakan perempuan muncul untuk memperjuangkan keterlibatan kaum perempuan dalam praktek politik dan hubungan internasional. Gerakan perempuan mencoba berbagai usaha untuk mengadvokasikan hak-hak perempuan dalam arena politik, khususnya. Hal ini dilakukan untuk mencapai adanya kesetaraan gender bagi kaum laki-laki dan perempuan dalam segala bidang.

---

<sup>6</sup> Nur Azizah, *Gender dan Politik (Mengapa Konstruksi Gender Bersifat Politis?)*(Yogyakarta: The Phinisi Press, 2017), hlm. 7-8

Feminisme berasumsi bahwa pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tersebut hanyalah bentukan norma dan perilaku masyarakat itu sendiri, bukan sesuatu yang bersifat kodrati atau alami, sehingga pada prinsipnya hal tersebut dapat dirubah. Kaum feminisme berasumsi bahwa pembagian peran ini sangat merugikan kaum perempuan dan sangat membatasi gerak perempuan. Itu mengapa pemikir feminisme semakin berkembang untuk memperjuangkan hak kaum perempuan agar sama seperti kaum laki-laki. Feminisme tidak hanya berarti memperjuangkan hak-hak kaum perempuan saja tanpa memikirkan keterlibatan kaum laki-laki, tetapi memperjuangkan kesetaraan hak baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan karena masih banyak pula kaum laki-laki yang dirugikan oleh adanya peran gender tradisional.

Semua gerakan feminis memiliki tujuan yang sama yaitu membangun dan memiliki hal yang sama seperti laki-laki dalam sektor-sektor seperti politik, ekonomi, sosial maupun personal. Menjadi feminis berarti memerdekakan dan memberdayakan perempuan untuk mengatur sendiri kehidupannya, apa yang ingin dicapai dan dilakukannya dalam dan bagi kehidupannya. Ia ingin menjadi ibu rumah tangga, ataupun politisi, dsb. Biarkan mereka menentukan apa yang ingin dilakukannya tanpa terikat oleh norma dan budaya masyarakat masih konservatif. Tidak hanya itu, sebagai pemeluk nilai feminisme, juga harus memperjuangkan kemerdekaan kaum laki-laki untuk menentukan apa yang ingin dilakukannya agar tidak terkekang oleh norma-norma maskulinitas yang terbentuk dalam masyarakat itu sendiri.

Dikarenakan feminisme diartikan sebagai gagasan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender, berarti bahwa kesetaraan gender ini menjadi tolak ukur seseorang ataupun suatu negara tersebut feminis atau tidak. Dalam penelitian ini, karena yang menjadi subjeknya adalah negara, sehingga tolak ukur feminisme disini adalah seberapa tinggi kesetaraan gender yang sudah berlangsung di negara tersebut. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai tingkatan kesetaraan gender

di Swedia, maka akan ada beberapa indikator yang akan digunakan, seperti kesenjangan kursi di parlemen, kesenjangan gaji, kesenjangan edukasi maupun kesenjangan dalam dunia kerja.

Swedia adalah subjek dari pelaku feminisme dalam penelitian ini, dan sesuai dengan definisi konsep dari feminisme yaitu mencari jalan keluar atas ketidaksetaraan yang dialami oleh perempuan atas laki-laki, maka melalui politik luar negeri feminis yang di keluarkan oleh Swedia ini, negara tersebut mencoba dan berusaha untuk mengurangi angka kesenjangan gender dan mencapai perdamaian secara global melalui politik luar negeri feminis yang dikeluarkannya, berupa mendukung peningkatan representasi perempuan dalam politik di Somalia dan Moldova, mendukung organisasi multilateral dalam mencapai kesetaraan gender seperti UE dan PBB, menerapkan gender marker dalam bantuan luar negeri.

## C.2. Konsep Soft Power

*Soft Power* adalah suatu komponen yang cukup signifikan digunakan oleh negara-negara dalam hubungan internasional saat ini. Jika *power* atau kekuasaan diartikan sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain agar melakukan sesuai yang diharapkan, maka konsep *Soft Power* menurut Joseph Nye adalah “kemampuan suatu negara untuk membujuk pihak lain untuk melakukan apa yang diinginkannya tanpa paksaan atau secara persuasif”<sup>7</sup>. Konsep ini pertama kali diciptakan oleh Joseph Nye pada akhir 1990-an. Menurut Nye, realitas terlalu menekankan pada *hard power*. Padahal, saat ini, budaya, kebijakan menjadi hal yang cukup penting dipertimbangkan dalam hubungan internasional, khususnya dalam penanggulangan permasalahan internasional. Sehingga menurutnya, negara-negara saat ini harus belajar mengenai sumber-sumber baru yang lebih relevan dalam

---

<sup>7</sup> G. John Ikenerry, “Soft Power”, diakses dari <https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/2004-05-01/soft-power-means-success-world-politics> pada 25 Maret 2018 pukul 23.57



mewujudkan tujuan mereka. Kekuasaan inilah yang disebutnya sebagai *soft power*. Selain itu kekuasaan yang dapat menuntun kapabilitas, budaya, ideologi dan sistem sosial dari pihak lain inilah juga disebut sebagai *soft power*. Pada tahun yang sama saat peluncuran konsep tersebut, Nye juga meluncurkan sebuah artikel yang berjudul “The Soft Power”. Dalam artikel tersebut dia mendefinisikan lagi *soft power* sebagai suatu kemampuan pengenalan budaya dan menuntun pihak lain untuk mengikuti apa yang diinginkan negaranya, dan kekuasaan atau kemampuan ini berasal dari daya tarik budaya dan nilai yang dianut oleh suatu bangsa. Yang artinya bahwa dalam mempengaruhi negara lain, maka negara tersebut harus menganut nilai yang akan ditawarkannya kepada pihak lain tersebut, sehingga bisa menjadi contoh bagi pihak lain yang ingin dipengaruhi tersebut.

Menurut Nye, *soft power* suatu negara bisa bersumber pada tiga hal yaitu budayanya (yang dianggap menarik bagi pihak lain), nilai-nilai politiknya (yang berpengaruh baik didalam maupun diluar negeri), dan kebijakan luar negerinya (apabila dianggap sah dan memiliki otoritas moral)<sup>8</sup>, berikut penjelasan singkatnya :

a) Budaya

Budaya sendiri dapat didefinisikan sebagai nilai-nilai yang ada dimasyarakat. Jika nilai universal ada dalam budaya suatu negara yang kebijakannya diakui oleh pihak atau negara lain, maka kemungkinan untuk mencapai tujuannya akan meningkat karena adanya daya tarik dan kepercayaan dari pihak lain.

b) Nilai-nilai politik

Yang dimaksud dari nilai-nilai politik disini adalah nilai yang mereka coba untuk pengaruhkan kepihak lain sesuai dengan nilai politik yang mereka anut. Jika nilai tersebut berbeda dari apa yang sebenarnya

---

<sup>8</sup>Li Lin& Leng Hongtao, “Joseph Nye’s Soft Power Theory and Its Revelation Towards Ideological Political Education”, *Humanities and Social Sciences*. Vol. , No.2, 2017, hal. 69-71

mereka utarakan atau istilahnya standar ganda, maka upaya *soft power* tersebut akan sia-sia.

c) Kebijakan luar negeri

Sejauh mana suatu negara berpartisipasi dalam mekanisme multilateral, tingkat bantuan luar negerinya serta keamanan eksternalnya telah menjadi standar untuk mengukur *soft power* suatu negara.

Berdasarkan pemaparan mengenai definisi dari *soft power* diatas, maka dalam menjawab hipotesis dalam penelitian ini akan menjadi lebih mudah. Swedia dapat dikatakan sebagai negara yang yang cukup baik dalam menerapkan *soft power*, terbukti dari laporan Indeks *Soft Power*, Swedia selalu memasuki ranking 10 besar. Yang terakhir pada 2017 Swedia berada pada peringkat 9. Ini membuktikan bahwa Swedia adalah negara yang cukup lihai dalam memainkan *soft power* nya demi mencapai objektif dari politik luar negerinya.

Dari tiga sumber *soft power* yang diutarakan oleh Nye, yaitu budaya, nilai-nilai politik dan kebijakan luar negeri, dalam penelitian ini, ketiga sumber diatas dijadikan landasan yang cukup kuat dalam menjawab rumusan masalah. Budaya berdasarkan definisi KBBI adalah pikiran, adat istiadat dan nilai yang ada di masyarakat. Di Swedia, nilai kesetaraan gender yang da dimasyarakatnya sangat kuat dan masyarakatnya baik laki-laki maupun perempuan sangat sadar akan nilai kesetaraan gender. Itu mengapa negara ini termasuk salah satu negara yang kesenjangan gendernya sangat rendah. Hal inipun diakui oleh dunia. Selain itu, nilai-nilai politik yang dimaksud oleh Nye adalah nilai politik yang dianut oleh Swedia. Sangat jelas bahwa Swedia menganut nilai-nilai politik feminisme. Hal itu terbukti dengan diutarakannya komitmen pemerintah Swedia dalam menerapkan perspektif feminisme sebagai landasan negaranya yang mana negara ini menyatakan dirinya sebagai negara feminis pertama di dunia pada tahun 2014 silam. Nilai-nilai feminisme inilah yang ingin disebarakan oleh Swedia kepada negara-negara lain. Sehingga

terbukti bahwa nilai-nilai politik yang akandipengaruhi kepada pihak lain sesuai dengan nilai-nilai politik yang dianutnya dalam negeranya.

Selain itu sumber yang kedua adalah kebijakan luar negeri. Sumber soft power yang kedua ini juga sangat relevan dengan kasus Swedia. Swedia menggunakan soft power dalam menyebarkan ideologi feminisme karena Swedia adalah negara yang memiliki *high profile*, yang mana Swedia adalah mitra yang baik dalam mekanisme multilateral dengan banyaknya kontribusi Swedia dalam berbagai mekanisme multilateral, misalnya di Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, Swedia adalah salah satu negara di dunia dengan tingkat bantuan pembangunan tertinggi berdasarkan data dari OECD DAC (The Organisation for Economic Co-operation and Development's Assistance Committee) tahun 2015, yang mana pada 2015, anggaran bantuan pembangunan Swedia berjumlah 0,96% dari GNI (Gross National Income) nya. Sehingga dengan begitu, dapat dikatakan bahwa Swedia adalah salah satu negara superpower dalam bantuan luar negeri. Yang terakhir adalah keamanan eksternalnya. Swedia yang berada di Eropa khususnya Skandinavia, berada dalam kondisi yang cukup kondusif tanpa adanya konflik yang berlarut-larut. Sehingga dengan kondisi mekanisme multilateral, tingkat bantuan luar negeri serta keamanan eksternalnya Swedia yang cukup signifikan menunjukkan bahwa inilah yang menjadi sumber kepercayaan diri Swedia dalam menyebarkan ideologi feminis melalui *soft power*.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya juga, bahwa tujuan dari pemerintah Swedia adalah untuk mencapai keadilan dan perdamaian global. Melalui politik luar negeri yang menganut ideologi feminisme, Swedia berupaya untuk mencapai keadilan untuk perdamaian global dengan mempengaruhi berbagai pihak untuk lebih sadar akan pentingnya peran perempuan dalam berbagai hal, khususnya pengambilan keputusan. Maka dari itu, sebagai negara feminis, Swedia berupaya untuk mempengaruhi negara-negara

berkembang khususnya negara yang partisipasi perempuan dalam politiknya masih rendah untuk menerapkan kebijakan yang pro terhadap perempuan. Dalam mempengaruhi negara-negara tersebut, Swedia berupaya dengan cara-cara yang persuasif, yaitu melalui berbagai macam pertemuan dan dialog perihal perempuan dengan organisas-organisasi perempuan di negara tersebut maupun dengan pemerintah pusatnya, serta memberikan bantuan luar negeri kepada negara-negara dan organisasi yang bersangkutan. Dalam konteks penelitian ini adalah melalui bantuan luar negeri dan pertemuan serta dialog dengan negara-negara yang partisipasi perempuan dalam politiknya masih rendah, yaitu Somalia dan Moldova. Melalui perwakilannya di negara-negara tersebut, yaitu kedutaan besar Swedia berusaha untuk mempromosikan isu kesetaraan gender melalui berbagai diskusi baik dengan masyarakatnya maupun dengan organisasi pemerintah. Selain itu, Swedia juga menggunakannya dalam mendukung organisasi multilateral dalam mencapai kesetaraan gender, yaitu dengan menjadi salah satu donatur terbesar dalam berbagai kegiatan program-program badan-badan PBB dan UE untuk mencapai kesetaraan gender. Tidak hanya itu, sebagai negara *super power* dalam memberikan bantuan luar negeri, Swedia pun mulai menerapkan *Gender Marker* dalam memberikan bantuan dengan tujuan projek yang diberi bantuan tersebut apakah memiliki berkontribusi dalam memajukan kesetaraan gender atau tidak.

#### **D. Hipotesa**

Penulis membuat hipotesa mengenai implementasi Politik Luar Negeri Feminis Swedia tahun 2014 - 2017, sebagai berikut :

1. Mendukung peningkatan representasi perempuan dalam politik di Somalia dan Moldova.
2. Mendukung badan-badan EU dan PBB dalam mencapai kesetaraan gender.

3. Menerapkan *Gender Marker* dalam memberikan bantuan kemanusiaan.

#### **E. Jangkauan Penelitian**

1. Penulis membahas mengenai apa Politik Luar Negeri Feminis Swedia.
2. Penulis juga membahas mengenai bentuk-bentuk tindakan yang dilakukan oleh Swedia dalam menerapkan politik luar negeri feminis.
3. Penulis memberikan batasan dalam penulisan penelitian ini agar lebih spesifik, yakni dengan menentukan rentan waktu pada analisis masalah yaitu dalam kurun waktu 2014-2017.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Penulis memiliki tujuan dalam penelitian dengan judul “Implementasi Politik Luar Negeri Feminis Swedia (2014-2017)”. Tujuan tersebut diantaranya :

1. Menjelaskan mengenai politik luar negeri feminis Swedia.
2. Menegaskan bahwa politik luar negeri feminis Swedia sangat berperan penting dalam mengangkat isu kesetaraan gender melalui berbagai forum dialog internasional dan melalui komitmen bantuan kemanusiaan yang berbasis pada gender mainstreaming.
3. Menambah data koleksi penelitian mengenai studi tentang Feminisme di Skandinavia, khususnya dalam studi Ilmu Hubungan Internasional UMY karena masih sedikitnya buku-buku dan penelitian tentang negara-negara Skandinavia.
4. Selain itu, penulisan hasil penelitian ini ditunjukkan sebagai pemenuhan tugas akhir program Strata 1 Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas

### **G. Metode Penelitian**

Ada perbedaan mendasar terkait metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dimana penelitian kuantitatif berbasis pada angka dan penelitian kualitatif berbasis pada informasi-informasi sosial. Sehingga penelitian kualitatif analisisnya berdasarkan informasi-informasi yang dapat dikatakan subjektif karena tidak ada wujud nyata dalam bentuk angka.

Skripsi yang sedang ditulis oleh penulis merujuk pada penelitian sosial, sehingga penulis memilih menggunakan metode penelitian kualitatif dalam melakukan analisis untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang dibuat oleh penulis. Dalam mencari bahan dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis mengumpulkan data-data menggunakan studi kepustakaan dengan merujuk pada buku-buku, jurnal-jurnal, berita, artikel, dan situs resmi yang relevan dengan Politik Luar Negeri Feminis Swedia.

### **H. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini berisi pemaparan yang dirinci dalam 5 bab dengan masing-masing bab terdiri dari sub-bab.

BAB I adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan pemikiran, hipotesis, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II pada bab ini akan dipaparkan mengenai kesenjangan gender yang masih terjadi saat ini, baik dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan dan juga bidang kemanusiaan, kesenjangan gender yang terjadi di Somalia dan Moldova serta konvensi mengenai kesetaraan gender PBB dan UE.

BAB III pada bab ini akan dipaparkan mengenai sejarah feminisme di Swedia, kesetaraan gender di Swedia dan Politik Luar Negeri Feminis Swedia

BAB IV pada bab ini akan dipaparkan keterkaitan antara konsep feminisme dan konsep soft power dan kaitannya dengan implementasi dari politik luar negeri Feminis Swedia Tahun 2014-2017.

BAB V merupakan bab terakhir sekaligus penutup dalam skripsi ini, dan pada bagian ini akan memuat kesimpulan dari penjelasan di bab-bab sebelumnya.

